

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat, dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang (termasuk Indonesia) adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2013).

Persoalan pengangguran ini juga masih menjadi perhatian yang serius di antara banyak pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Keadaan di Indonesia dalam beberapa tahun ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak dapat mengadakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan cepat. Semakin tingginya tingkat kelahiran penduduk namun tidak sejalan dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia, membuat jumlah pengangguran di Indonesia menjadi semakin tinggi. Oleh karenanya masalah pengangguran yang kita hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak.

Sejalan dengan persoalan pengangguran diatas, negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju maupun negara sedang berkembang senantiasa menghadapi masalah pengangguran. Perbedaannya, negara berkembang tidak dapat mampu memberikan tunjangan kepada warga negaranya yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan jaminan tersebut.

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, meningkatkan produksi serta mengembangkan kegiatan ekonomi, karena penduduk menyediakan tenaga kerja dan tenaga ahli yang di perlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Tetapi harus di sadari bahwa dengan jumlah penduduk yang besar saja bukan merupakan jaminan yang besar bagi berhasilnya pembangunan, karena tanpa ada peningkatan kesejahteraan justru dapat menjadi hambatan bagi program-program pembangunan yang di laksanakan (Sukirno, 2011).

Sumatera memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimantan. Tingkat kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 105 jiwa per km², dengan kepadatan tertinggi di Provinsi Kep. Riau mencapai 205 jiwa per km², dan terendah Provinsi Jambi sebesar 62 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk Wilayah Sumatera dalam periode 2000-2010 mencapai 1,8 % per tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional 1,5 persen per tahun (BPS, 2013).

Jumlah penduduk yang banyak mempunyai akibat bagi kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang banyak disertai kemampuan dan usaha dapat meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru, akan tetapi apabila jumlah

penduduk yang banyak tidak disertai dengan kemampuan dan usaha dapat menghambat kesempatan kerja dan bisa berakibat menimbulkan pengangguran.

Angka tingkat pengangguran di Indonesia hingga saat ini sebesar 7,39 juta orang dari total angkatan bekerja 118,19 juta orang. Sedangkan orang yang bekerja mencapai 110,80 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2013). Tingkat pengangguran di Sumatera pada Februari 2013 mencapai 5,42 %, lebih rendah dibanding dengan tingkat pengangguran nasional sebesar 5,92 %, dengan tingkat tertinggi di Provinsi Aceh dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam periode 2008 – 2013. jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 11.468 orang, dengan jumlah penduduk bekerja pada Februari 2013 sebanyak 114.021 orang (Bappenas, 2013).

Kinerja yang dilakukan pemerintah dalam menekan jumlah tingkat pengangguran sebenarnya masih kurang maksimal. Salah satu sumber permasalahan banyaknya pengangguran adalah kurangnya lapangan pekerjaan, peluang usaha, urbanisasi, dan lain-lain. Banyak aspek yang menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan peluang usaha, salah satu contoh adalah aspek kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan aspek yang penting karena kebijakan adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap suatu hal yang menjadi wewenangnya.

Peran pemerintah berfungsi untuk melakukan kebijakan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjalankan kebijakan yang konsisten tersebut dengan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal. Pemerintah memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya

masing-masing untuk mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas dan kesejahteraan. Selain dari pemerintah, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam upaya pengurangan jumlah tingkat pengangguran serta membantu dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Menurut Keynes, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi masalah perekonomian. Pada tingkat makro, pemerintah harus aktif dalam mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment. Full employment merupakan sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan tindakan yang terencana, dan bukan sesuatu yang akan datang secara otomatis.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2004). Pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dilihat dari aspek ekonomi maupun sosial. Salah satu sasaran pembangunan adalah untuk menciptakan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya agar angkatan kerja yang ada dapat terserap dalam kegiatan ekonomi (Rimbawan, 2010).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Pembangunan ekonomi daerah pada intinya adalah menciptakan lapangan

kerja bagi penduduk daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dibidang ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan ekonomi kurang bermakna.

Perkembangan perekonomian wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2009 – 2013 rata meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,35 % per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 sebesar 6, 53 %. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi tumbuh positif (Bappenas, 2013).

Pemerintah di tiap provinsi perlu untuk melakukan upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Kegiatan perekonomian di provinsi dapat tumbuh dikarenakan di setiap daerah melakukan bermacam aktifitas/kegiatan ekonomi yang timbul di tiap daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dapat menggambarkan peningkatan kinerja ekonomi wilayah. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi diharapkan produktivitas dan pendapatan masyarakat akan meningkat melalui penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Selain itu, masalah pengendalian inflasi merupakan usaha yang penting dan menjadi tantangan bagi pemerintah. Meskipun laju pertumbuhan pendapatan perkapita meningkat tapi jika dibarengi dengan kenaikan harga yang melebihi peningkatan pendapatan maka akan mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya dan hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan (Per Menaker PER 01/MEN/1999 nomor 2). Pertumbuhan inflasi yang tinggi berdampak pada tingkat pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka tingkat pengangguran tinggi, ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi semakin mengecil atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil.

Namun, pada Tahun 1929 A.W Philips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Inggris. A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan Kurva Phillips.

Penerapan teori *Phillips's Curve* di Indonesia diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan inflasi dan tingkat pengangguran di Indonesia. Pengangguran sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia. Pengangguran sendiri adalah suatu kondisi dimana terjadi kelebihan jumlah pekerja yang ditawarkan dibandingkan permintaan. Karena pengangguran ini disebabkan adanya imbas dari naik turunnya kondisi ekonomi sehingga permintaan tenaga

kerja lebih rendah dari penawaran. Terjadi *trade-off* antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi, seperti yang tergambarkan dalam Kurva Philip. Dimana saat angka tingkat pengangguran ingin diturunkan, angka tingkat inflasi akan meninggi dan begitupun sebaliknya, disaat kita ingin menurunkan tingkat inflasi, angka tingkat pengangguran menjadi tinggi. Diperlukan keadaan equilibrium yang sesuai antara kedua *trade-off* di atas.

Amir (2003) menganalisis pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 1980 – 2005 dengan menggunakan analisis grafis dan metode ANOVA. Variabel dependennya adalah tingkat pengangguran dan variabel independennya adalah inflasi. Hasilnya adalah terdapat hubungan negatif namun tidak signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran baik secara statistik maupun grafis. Hal ini diduga karena inflasi di Indonesia lebih cenderung disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi, seperti misalnya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan karena kenaikan permintaan.

Perkembangan inflasi di Sumatera dari Tahun 2009 – 2013 sangat berfluktuatif. Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi inflasi tetap berada di kisaran sarannya antara lain terkait dengan prospek harga komoditas global yang masih akan rendah, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta prospek peningkatan produksi bahan pangan. Berdasarkan teori kurva philip, maka diharapkan inflasi yang rendah berkontribusi terhadap tingkat pengangguran yang tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis hubungan antara inflasi dengan

tingkat pengangguran di Sumatera sesuai dengan pendekatan Kurva Phillips sehingga dapat diperoleh mekanisme kerja kedua variabel tersebut.

Dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas manusia merupakan sasaran utama pembangunan ekonomi, ini berarti bahwa semua sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan harus dikelola untuk meningkatkan kapabilitas manusia (Ul Haq, 1998). Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat untuk melihat pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, namun sejak publikasi pertama dari Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Reports*) pada 1990 oleh UNDP, *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuktikan sebagai indikator pengukuran pembangunan manusia di seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup atau kualitas sumber daya manusia.

Secara teori ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia seharusnya dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada. Teori ekonomi menyatakan jika pertumbuhan ekonomi meningkat menunjukkan semakin banyaknya *output* nasional, mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja sehingga seharusnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan (Hermanto, 2008).

Kualitas sumber daya manusia dapat di lihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan kualitas manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

Keadaan pembangunan di provinsi-provinsi yang berada di Pulau Sumatera yang sedang dilakukan sekarang ini tidak luput dari permasalahan pengangguran. Berdasarkan hal ini maka penelitian akan difokuskan pada objek penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat pengangguran di Sumatera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Sumatera
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Sumatera
3. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat pengangguran di Sumatera

C. Tujuan Penulisan

Untuk melihat seberapa besar jumlah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Sumatera

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Mahasiswa bisa mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan kualitas sumber daya manusia dengan tingkat pengangguran di Sumatera.
3. Sebagai Ilmu Pengetahuan. Secara umum penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan ini yaitu dapat melengkapi kajian mengenai ketenagakerjaan serta pengangguran di Sumatera yang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kualitas sumber daya manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan utama pembangunan ekonomi diantaranya adalah untuk mengurangi jumlah tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu indikator pengukur prestasi kegiatan ekonomi untuk menentukan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran dijelaskan dalam teori hukum okun. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran menggunakan aplikasi Hukum Okun telah banyak diteliti. Metode yang digunakan adalah metode OLS untuk estimasi kuantitatifnya dengan tingkat pengangguran sebagai variabel dependen, pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja serta jumlah pengangguran periode sebelumnya sebagai variabel independen. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran sesuai dengan Hukum Okun (Simamare, 2006).

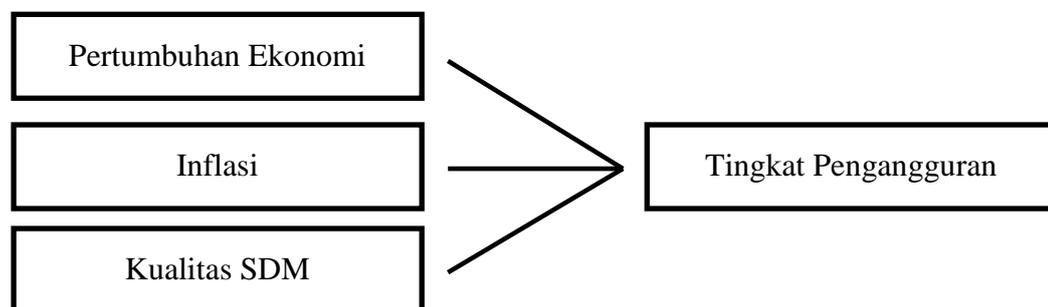
Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam *output* dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada tingkat pengangguran. Kurva Philips menyatakan terdapat *trade off* antara inflasi dengan tingkat pengangguran, yaitu apabila tingkat inflasi tinggi maka tingkat pengangguran rendah. Bila tingkat inflasi tinggi, menyebabkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja lebih untuk meningkatkan *output*. Hal ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi bertambah atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan tinggi dan tingkat pengangguran akan menurun. (Samuelson dan Nordhaus, 2004).

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia disuatu provinsi mempengaruhi pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan suatu provinsi. Secara umum, peningkatan sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari tiga komponen yang berhubungan dengan tingkat produktifitas masyarakatnya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, produktifitas masyarakat akan meningkat dan

akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya. Pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri, yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Dimana dalam pembangunan berkelanjutan tersebut adalah dengan salah satunya mengurangi jumlah pengangguran yang ada (Putu Eka, 2005).

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan peningkatan kualitas SDM adalah isu-isu yang penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi dari setiap negara. Penelitian terdahulu banyak mengacu pada masalah pengangguran, yang menjelaskan bahwa pengangguran merupakan sifat endemik di banyak negara, terutama negara berkembang.

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang sistematis:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Sumatera
2. Diduga variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Sumatera
3. Diduga kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Sumatera